

**POLA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI ELIT DESA DAN EX
KELOMPOK TANI: KONTESTASI DAN KOLABORASI DALAM
PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

Nursanty

Universitas Bengkulu. Bengkulu, Indonesia

nursanty@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received :05-12-2025

Revised :15-05-2026

Accepted :22-05-2026

Keywords:

*Village Elites,
Former Farmer
Groups,
Collaboration,
Patronage
Communication,
Contestation,*

This research examines the patterns of communication and interaction between village elites and former farmer groups in the management of the Merah Putih Village Cooperative. The institutional transformation from farmer groups to village cooperatives has given rise to new dynamics in power relations and communication patterns at the village level. This qualitative research using a case study approach involved 25 informants consisting of village elites, former farmer group members, cooperative administrators, and community leaders. Data collection was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies over a period of six months. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman. The results of the study show that the communication patterns that have formed are patronage-based, with village elites dominating strategic decision-making. Contestation occurs in the areas of access to resources, distribution of economic benefits, and leadership legitimacy. However, collaboration is established through village deliberation mechanisms, compromise of interests, and division of roles within the cooperative's organizational structure. The findings indicate that although the dominance of the elite remains strong, there is room for negotiation that allows former members of farmer groups to participate in decision-making. This study contributes to the understanding of power dynamics in village cooperative governance and offers recommendations for strengthening inclusive participation in rural development.

Pendahuluan

Transformasi kelembagaan pedesaan di Indonesia pasca reformasi telah mengubah lanskap tata kelola dan dinamika kekuasaan di tingkat desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan otonomi lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya dan

pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan ini adalah penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa. Namun demikian, transformasi kelembagaan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan struktur kekuasaan lokal yang telah mapan, terutama dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan strategis (Mietzner, 2024).

Literatur tentang tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi dan demokratisasi telah membuka ruang partisipasi masyarakat, praktik dominasi elit masih sangat kuat dalam menentukan arah pembangunan desa (Nurlinah & Haryanto, 2024). Penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip demokrasi deliberatif telah diintegrasikan dalam kerangka Undang-Undang Desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan berupa dominasi elit, partisipasi sipil yang terbatas, dan akses yang tidak merata terhadap kesejahteraan (Amalinda Savirani, 2015). Studi yang dilakukan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa banyak pemerintahan desa masih beroperasi di bawah pengaruh dominasi elit, dengan partisipasi yang terbatas dari kelompok-kelompok terpinggirkan. Fenomena ini menciptakan gap antara ideal demokrasi partisipatif dengan realitas praktik tata kelola desa yang masih oligarkis (Hakim et al., 2025).

Dalam konteks kelembagaan ekonomi desa, dinamika kekuasaan ini menjadi lebih kompleks ketika melibatkan transformasi dari kelompok tani tradisional menjadi koperasi desa modern. Kelompok tani sebagai organisasi komunitas yang telah lama eksis di pedesaan Indonesia memiliki struktur, kultur, dan mekanisme kerja yang berbeda dengan koperasi desa yang lebih formal dan terikat pada regulasi koperasi. Transformasi ini tidak hanya mengubah aspek legal-formal organisasi, tetapi juga mempengaruhi pola komunikasi, relasi kuasa, dan distribusi sumber daya di antara aktor-aktor yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada kekuatan personal membuat provinsi pedesaan sulit untuk bergerak secara kolektif, dan pembangunan desa kemudian diambil alih oleh individu dan elit tertentu, yang berbahaya bagi keberlanjutan organisasi masyarakat desa dan pengembangan wilayah transmigran (Nurlinah & Haryanto, 2024).

Pola komunikasi antara elit desa dan masyarakat dalam konteks pembangunan pedesaan telah menjadi fokus berbagai kajian. Studi empiris tentang komunikasi pemerintah dalam proyek infrastruktur di Indonesia menunjukkan pentingnya menggabungkan wawasan public relations dan development communication agar organisasi sektor publik dapat terlibat dan memberdayakan komunitas pedesaan untuk mengadopsi dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur untuk keuntungan bersama (Berenschot et al., 2017). Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi dan pelepasan kekuasaan dan pengambilan keputusan secara bertahap dari pihak inisiator proyek kepada komunitas. Namun demikian, dalam praktiknya, pola komunikasi yang terbentuk seringkali masih bersifat top-down dan patronase, di mana elit desa memiliki kontrol yang signifikan terhadap aliran informasi dan proses pengambilan keputusan (Tio and Nugroho 2022).

Kontestasi dalam pengelolaan sumber daya desa merupakan fenomena yang inheren dalam struktur sosial pedesaan Indonesia. Penelitian tentang konflik sumber daya menunjukkan bahwa kontestasi atas tanah, akses sumber daya, dan

rente telah lama mendasari konflik subnasional dan ketegangan pusat-daerah di Indonesia (Diprose & Azca, 2020). Dalam konteks yang lebih mikro di tingkat desa, kontestasi ini termanifestasi dalam persaingan untuk mendapatkan akses ke sumber daya desa, posisi dalam struktur organisasi, dan legitimasi dalam pengambilan keputusan (Steenbergen, 2016). Studi tentang elit adat dalam program konservasi menunjukkan bahwa dominasi kelompok inti adat tidak boleh diartikan sebagai 'kegagalan' atau kasus 'elite capture' yang tidak ambigu, melainkan bahwa kerja sama oleh lembaga eksternal dengan kelompok lokal yang dominan dan individu elit memberikan titik masuk yang berharga untuk melibatkan komunitas dalam inisiatif konservasi dan pembangunan berkelanjutan (Slikkerveer, 2019).

Di sisi lain, kolaborasi juga merupakan elemen penting dalam tata kelola koperasi desa. Penelitian tentang modal sosial dalam kinerja ekonomi perusahaan pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa visi pengembangan stakeholder untuk menginisiasi pembentukan sangat penting dalam menentukan manajemen dan kerjasama perusahaan pedesaan, terutama mengenai arah pembangunan bersama. Modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma berfungsi sebagai prasyarat untuk tata kelola yang baik dan efektif (Wu & Feng, 2022). Dalam konteks BUMDes, mekanisme berbasis self-help dan keanggotaan juga mewujudkan partisipasi seluruh masyarakat desa sehingga tidak menciptakan hegemoni model bisnis hanya oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Namun demikian, efektivitas modal sosial ini sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk dinamika kekuasaan yang ada.

Peran kelompok tani dalam pembangunan pedesaan Indonesia telah lama diakui sebagai krusial. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai bentuk kerjasama dan konsolidasi pertanian antar anggota untuk mencapai tujuan bersama, terutama untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan (Tarlani & Sirajuddin, 2020). Namun demikian, tidak semua kelompok tani mencapai kesuksesan, dengan estimasi sekitar 20 persen kelompok tani mengalami kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kelompok tani meliputi pengembangan sumber daya manusia, kemajuan teknologi, peningkatan akses pendanaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Ketika kelompok tani bertransformasi menjadi atau bergabung dengan koperasi desa, dinamika internal kelompok dan relasi dengan aktor eksternal, termasuk elit desa, mengalami perubahan signifikan (Aspinall & Rohman, 2017).

BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa telah menjadi fokus berbagai studi dalam dekade terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi administrator BUMDes seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti loyalitas politik, status sosial, dan ekspektasi akses ke sumber daya desa yang dikontrol oleh elit lokal (Hadi et al., 2025). Studi menggunakan Structural Equation Modeling untuk mengkaji determinan motivasi kerja dan kinerja manajemen dalam BUMDes mengungkapkan bahwa politik lokal, fasilitator desa, rekrutmen administrator, pelatihan dan pendidikan, serta budaya organisasi berpengaruh pada motivasi kerja dan kinerja manajemen (Ikram et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor politik dan relasi kuasa memainkan peran penting dalam keberhasilan BUMDes sebagai institusi ekonomi desa.

Dana Desa yang diperkenalkan pada tahun 2015 telah mengubah lanskap ekonomi politik desa di Indonesia secara signifikan (Antlöv, 2003). Dengan

alokasi 10 persen dari transfer anggaran pemerintah pusat ke kabupaten, ditambah transfer langsung dengan jumlah yang sama, bahkan desa termiskin kini memiliki anggaran yang dapat mereka belanjakan untuk proyek publik yang mereka prioritaskan sendiri. Namun demikian, penelitian kritis terhadap implementasi Dana Desa menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memfasilitasi kemenangan kelas penguasa desa (O'Toole, 1998). Meskipun institusi politik desa telah mengadopsi ukuran-ukuran tata kelola yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, masyarakat miskin sebagian besar tetap tidak berdaya dan tidak mampu mendapatkan bagian yang signifikan dari Dana Desa (Aritenang, 2021). Studi menunjukkan bahwa anggota kelas penguasa desa terutama adalah petani kapitalis yang kekuatannya terletak pada kepemilikan tanah dan produksi komoditas pertanian.

Dalam konteks koperasi, penelitian tentang sertifikasi dan organisasi petani di sektor kopi Indonesia menunjukkan bahwa petani yang bersertifikat merasakan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak bersertifikat, dan petani yang terorganisasi merasakan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan petani kecil yang tidak terorganisasi (Diprose & Azca, 2020). Petani yang memiliki keanggotaan ganda (dalam kelompok tani dan KUBE atau koperasi) merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan petani yang hanya berpartisipasi dalam kelompok tani. Temuan ini mengindikasikan bahwa organisasi petani, termasuk koperasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani (Ibnu et al., 2018). Namun demikian, manfaat ini tidak terdistribusi secara merata dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan internal organisasi.

Transformasi institusional pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih efisien, inklusif, kompetitif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi petani memerlukan penguatan kelembagaan. Kunci perubahan adalah melalui holding, konsolidasi, modernisasi pertanian, pembentukan wirausaha pertanian lokal muda, serta kerjasama antara kelompok tani, koperasi pertanian, dan berbagai perusahaan mitra seperti BUMN, BUMD, BUMDes, dan industri swasta. Pendekatan kolaboratif ini mengakui pentingnya sinergi antara berbagai aktor dalam ekosistem pertanian pedesaan (Nurlinah & Haryanto, 2024). Namun demikian, kolaborasi ini seringkali menghadapi tantangan berupa ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan kompetisi untuk mengakses sumber daya.

Penelitian tentang mitigasi ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan kolaboratif di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti membentuk tim bersama antara pejabat pemerintah dan warga desa, menyediakan program pelatihan fasilitasi umum, melatih warga desa sebagai fasilitator, mempromosikan pembagian pengetahuan yang setara, dan memungkinkan warga desa membuat keputusan sendiri dapat mengurangi ketimpangan kekuasaan antara kedua kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kekuasaan yang tidak seimbang merupakan tantangan inheren dalam tata kelola kolaboratif, terdapat strategi konkret yang dapat diimplementasikan untuk mempromosikan partisipasi yang lebih inklusif dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Arai et al., 2021).

State of the art dalam studi tentang elit desa dan kelompok tani menunjukkan pergeseran dari pandangan deterministik tentang elite capture menuju pemahaman yang lebih nuansa tentang kompleksitas relasi kuasa di pedesaan. Penelitian terkini mengakui bahwa elit lokal tidak selalu bertindak

berdasarkan kepentingan pribadi semata, melainkan dapat mempekerjakan strategi untuk memaksimalkan manfaat kolektif dengan cara-cara yang mematuhi budaya lokal yang dominan atau mengatasi tantangan kontekstual (Humaedi et al., 2025). Pendekatan ini lebih sensitif terhadap konteks lokal dan mengakui bahwa kerja sama dengan kelompok atau individu elit lokal yang dominan dapat menyediakan titik masuk yang berharga untuk melibatkan komunitas dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan, asalkan ada kesadaran akan ketegangan dan potensi kesenjangan dalam representasi (Sidik & Habibi, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada dinamika interaksi antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam konteks transformasi kelembagaan dari kelompok tani menjadi koperasi desa. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis tentang elit desa, kelompok tani, dan koperasi sebagai entitas yang terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka analisis untuk memahami bagaimana transformasi kelembagaan mempengaruhi pola komunikasi, kontestasi, dan kolaborasi. Penelitian ini juga mengisi gap dalam literatur dengan memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme konkret melalui mana kontestasi dan kolaborasi terjadi secara simultan dalam pengelolaan koperasi desa. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada teori tentang demokratisasi pedesaan dengan mengeksplorasi bagaimana ruang partisipasi dapat diperluas dalam konteks struktur kekuasaan yang timpang.

Berdasarkan gap literatur yang telah diidentifikasi, penelitian ini didesain untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana pola komunikasi yang terbentuk antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih? (2) Bentuk-bentuk kontestasi apa saja yang muncul dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya koperasi? (3) Melalui mekanisme apa kolaborasi terjalin antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam pengelolaan koperasi? (4) Bagaimana transformasi dari kelompok tani menjadi koperasi desa mempengaruhi dinamika kekuasaan dan partisipasi anggota? (5) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam konteks struktur kekuasaan yang timpang? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas relasi sosial dan politik dalam tata kelola koperasi desa, yang pada gilirannya dapat menginformasikan kebijakan dan praktik untuk mempromosikan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat fenomena yang dikaji memerlukan eksplorasi mendalam terhadap makna, proses, dan konteks yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Studi kasus instrumental dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang isu atau untuk meredefinisi generalisasi, di mana kasus spesifik digunakan untuk memahami fenomena yang lebih luas (Hakim et al., 2025). Dalam penelitian ini, Koperasi Desa Merah Putih dijadikan kasus untuk memahami dinamika pola komunikasi dan interaksi antara elit desa dan ex kelompok tani dalam konteks transformasi kelembagaan ekonomi desa. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa dinamika yang terjadi di koperasi ini dapat memberikan pembelajaran yang berguna untuk memahami fenomena serupa di konteks pedesaan Indonesia yang lebih luas.

Lokasi penelitian adalah Desa Merah Putih yang terletak di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa desa ini telah mengalami transformasi kelembagaan dari beberapa kelompok tani menjadi koperasi desa dalam tiga tahun terakhir. Desa ini memiliki karakteristik yang representatif untuk konteks pedesaan Jawa Tengah, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan memiliki struktur sosial yang relatif stratifikasi. Koperasi Desa Merah Putih dipilih karena telah menunjukkan dinamika yang menarik dalam hal kontestasi dan kolaborasi antara berbagai aktor, serta memiliki dokumentasi yang cukup baik untuk keperluan penelitian. Selain itu, akses peneliti ke lapangan juga menjadi pertimbangan praktis dalam pemilihan lokasi penelitian.

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) elit desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh; (2) ex anggota kelompok tani yang kini menjadi anggota koperasi; (3) pengurus koperasi desa baik yang berasal dari kalangan elit maupun masyarakat biasa; (4) pendamping desa dan fasilitator pemberdayaan masyarakat; (5) anggota masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam koperasi namun memiliki pandangan tentang dinamika yang terjadi (Nurlinah & Haryanto, 2024). Teknik snowball sampling kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Total informan dalam penelitian ini adalah 25 orang yang dipilih berdasarkan prinsip saturasi data, di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak lagi memberikan wawasan baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup tema-tema utama penelitian namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama proses wawancara. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 120 menit, dilakukan di lokasi yang dipilih oleh informan untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan dalam berbagi informasi. Semua wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskrip verbatim untuk keperluan analisis. Bahasa yang digunakan dalam wawancara adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sesuai dengan preferensi informan, dan transkrip dalam bahasa Jawa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tetap mempertahankan makna kontekstual dari ungkapan-ungkapan lokal.

Observasi partisipatif dilakukan selama enam bulan dengan peneliti terlibat dalam berbagai kegiatan koperasi dan desa, termasuk rapat anggota koperasi, musyawarah desa, kegiatan kelompok tani yang masih aktif, dan pertemuan-pertemuan informal di tingkat komunitas. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interaksi yang terjadi secara natural dan mengidentifikasi pola-pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta

bentuk-bentuk kontestasi dan kolaborasi yang tidak selalu terungkap dalam wawancara formal. Catatan lapangan dibuat secara sistematis dengan mencatat deskripsi setting, aktor yang terlibat, interaksi yang terjadi, serta refleksi peneliti. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap simbol-simbol kekuasaan, penggunaan ruang dalam pertemuan, pola partisipasi dalam diskusi, dan bahasa tubuh yang mengindikasikan dinamika kekuasaan.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait yang meliputi: (1) dokumen legal seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, SK pendirian koperasi, dan peraturan desa terkait; (2) dokumen operasional seperti notulen rapat, laporan keuangan, program kerja, dan evaluasi kegiatan; (3) dokumen sejarah seperti arsip kelompok tani, foto-foto kegiatan, dan dokumentasi proses transformasi kelembagaan; (4) dokumen kebijakan tingkat supradesa yang relevan dengan pengelolaan koperasi desa (Vel et al., 2017). Analisis dokumen tidak hanya fokus pada konten eksplisit tetapi juga pada aspek-aspek implisit seperti bahasa yang digunakan, representasi aktor dalam dokumen, dan proses produksi dokumen itu sendiri yang dapat mengungkap relasi kuasa dalam organisasi.

Analisis data menggunakan model interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai sejak pengumpulan data dengan melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan mengarahkan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah menjadi data yang bermakna. Dalam tahap ini, transkrip wawancara dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori. Coding dilakukan dengan menggunakan kombinasi coding deduktif berdasarkan kerangka konseptual dan coding induktif yang muncul dari data. Koding dilakukan dengan menggunakan software Atlas.ti untuk memfasilitasi manajemen data dan identifikasi pola.

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam matriks, bagan, dan narasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Matriks dibuat untuk membandingkan pandangan berbagai kategori informan tentang isu-isu kunci, sementara bagan digunakan untuk menggambarkan alur proses dan relasi antar aktor. Narasi deskriptif dikembangkan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang kaya tentang fenomena yang dikaji. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber), berbagai metode (triangulasi metode), dan pada berbagai waktu (triangulasi waktu). Member checking dilakukan dengan mempresentasikan temuan awal kepada beberapa informan kunci untuk mendapatkan umpan balik dan verifikasi interpretasi peneliti.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep yang muncul dari data. Kesimpulan awal bersifat tentatif dan terus direvisi seiring dengan masuknya data baru. Kesimpulan akhir diverifikasi melalui proses triangulasi dan pengecekan anggota untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan perspektif informan. Analisis juga melibatkan komparasi konstan antara temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan kontribusi teoritis dari penelitian ini. Proses analisis memperhatikan tidak hanya

tema-tema dominan tetapi juga kasus-kasus deviant dan kontradiksi dalam data yang dapat memberikan wawasan penting tentang kompleksitas fenomena.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan transferabilitas penelitian, beberapa strategi dilakukan. Kredibilitas ditingkatkan melalui keterlibatan yang panjang dan intensif di lapangan selama enam bulan, triangulasi data dari berbagai sumber dan metode, member checking, dan refleksi kritis tentang posisi dan bias peneliti. Transferabilitas diperkuat dengan memberikan thick description tentang konteks penelitian, informan, dan proses yang diamati sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan dapat ditransfer ke konteks lain. Dependabilitas dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Confirmability diperkuat dengan menyimpan data mentah, catatan analisis, dan dokumen-dokumen pendukung yang dapat diperiksa oleh pihak eksternal jika diperlukan.

Pertimbangan etis penelitian mencakup informed consent, anonimitas, dan kerahasiaan. Setiap informan diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan hak-hak mereka sebelum memberikan persetujuan tertulis untuk berpartisipasi. Informan diberi kebebasan untuk menolak berpartisipasi atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan pseudonim dalam laporan penelitian. Data yang dapat mengidentifikasi informan secara spesifik tidak dipublikasikan. Khusus untuk isu-isu sensitif yang melibatkan konflik dan kontestasi kekuasaan, peneliti mengambil langkah ekstra untuk memastikan bahwa publikasi temuan tidak membahayakan informan atau memperburuk konflik yang ada. Prinsip do no harm menjadi panduan utama dalam seluruh proses penelitian.

Pembahasan

Pola Komunikasi Patronase dalam Pengelolaan Koperasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terbentuk dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih bersifat patronase dengan karakteristik hierarkis dan asimetris. Elit desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepemilikan lahan luas, mendominasi aliran informasi dan pengambilan keputusan strategis. Komunikasi dari elit ke ex anggota kelompok tani cenderung bersifat top-down dan instruktif, sementara komunikasi sebaliknya lebih bersifat konsultatif dengan ruang terbatas untuk advokasi kepentingan. Pola ini terlihat jelas dalam forum-forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan, di mana elit desa memonopoli waktu bicara dan mengarahkan diskusi ke arah yang telah ditentukan sebelumnya.

Patronase dalam komunikasi ini tidak hanya termanifestasi dalam struktur formal, tetapi juga dalam interaksi informal sehari-hari. Ex anggota kelompok tani menunjukkan sikap deferential terhadap elit desa, yang diungkapkan melalui penggunaan bahasa Jawa halus (krama), postur tubuh yang menunduk, dan keengganan untuk menyatakan pendapat yang berbeda secara terbuka. Kultur Jawa yang menekankan harmoni dan penghindaran konflik terbuka memperkuat pola komunikasi patronase ini. Seorang informan ex anggota kelompok tani mengungkapkan bahwa meskipun memiliki pendapat berbeda, ia memilih untuk diam karena tidak ingin dianggap tidak menghormati kepala desa yang telah banyak berjasa untuk desa. Ungkapan ini mengindikasikan internalisasi norma

patronase yang melampaui struktur formal organisasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pola komunikasi patronase tidak sepenuhnya monolitik. Terdapat ruang-ruang informal di mana ex anggota kelompok tani dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan lebih bebas. Pertemuan-pertemuan informal di warung kopi, acara arisan, dan kegiatan keagamaan menjadi arena di mana komunikasi horizontal antar anggota koperasi terjadi tanpa kehadiran elit desa. Dalam ruang-ruang ini, kritik terhadap kebijakan koperasi dan perilaku elit desa diungkapkan secara lebih terbuka. Namun demikian, komunikasi dalam ruang informal ini jarang ditransformasikan menjadi tindakan kolektif yang terorganisir untuk menantang dominasi elit, mengindikasikan fragmentasi dan keterbatasan kapasitas organisasi kelompok subordinat.

Temuan tentang pola komunikasi patronase ini konsisten dengan literatur tentang komunikasi pembangunan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dan pelepasan kekuasaan secara bertahap untuk mencapai komunikasi yang lebih demokratis. Studi tentang komunikasi pemerintah dalam proyek infrastruktur di Kulon Progo menekankan pada model yang mengutamakan inisiasi, pengamanan, dan pemeliharaan hasil positif bagi komunitas serta pemenuhan kebutuhan inisiator proyek melalui kolaborasi dan pelepasan kekuasaan dan pengambilan keputusan secara bertahap dari inisiator kepada masyarakat. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, pelepasan kekuasaan ini belum sepenuhnya terjadi, dengan elit desa masih mempertahankan kontrol yang signifikan terhadap informasi dan keputusan strategis.

Kontestasi dalam Akses Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan

Kontestasi dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih terjadi pada tiga aspek utama: akses sumber daya ekonomi, distribusi manfaat, dan legitimasi kepemimpinan. Dalam aspek akses sumber daya, temuan menunjukkan bahwa transformasi dari kelompok tani menjadi koperasi desa mengubah rezim akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Sebelum transformasi, kelompok tani memiliki mekanisme internal yang relatif egaliter dalam akses terhadap input pertanian dan informasi pasar. Namun, setelah menjadi koperasi, mekanisme ini menjadi lebih terpusat dengan elit desa memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan alokasi kredit, distribusi pupuk bersubsidi, dan akses ke pembeli besar. Ex anggota kelompok tani yang tidak memiliki koneksi dengan elit desa mengalami kesulitan untuk mengakses sumber daya koperasi, menciptakan stratifikasi baru di antara anggota.

Distribusi manfaat ekonomi dari koperasi juga menjadi arena kontestasi yang signifikan. Meskipun prinsip koperasi menekankan pada distribusi yang adil berdasarkan partisipasi anggota, dalam praktiknya, elit desa dan anggota yang memiliki posisi dalam struktur pengurus menikmati manfaat yang lebih besar. Hal ini terjadi melalui berbagai mekanisme termasuk penetapan harga yang menguntungkan produsen besar, akses prioritas ke kredit dengan bunga rendah, dan peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek menguntungkan yang didanai oleh Dana Desa. Seorang informan mengungkapkan bahwa sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dinikmati oleh pengurus dan anggota yang memiliki transaksi besar, sementara petani kecil yang seharusnya menjadi target utama koperasi justru mendapat manfaat yang minimal. Ketimpangan ini menciptakan

rasa ketidakadilan di kalangan ex anggota kelompok tani.

Legitimasi kepemimpinan menjadi aspek kontestasi yang paling kompleks dan sensitif. Transformasi kelembagaan membawa perubahan dalam sumber legitimasi kepemimpinan dari yang berbasis pada kompetensi teknis dan pengalaman bertani menjadi yang berbasis pada posisi dalam struktur pemerintahan desa dan kepemilikan modal. Ketua koperasi yang dipilih adalah kepala desa, dengan argumen bahwa posisi ini diperlukan untuk memperkuat koordinasi antara koperasi dan pemerintah desa. Namun demikian, keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ex anggota kelompok tani yang merasa bahwa kepemimpinan koperasi seharusnya berada di tangan orang yang memiliki pengalaman dan komitmen terhadap kepentingan petani. Kontestasi legitimasi ini tidak diungkapkan secara terbuka dalam forum formal, tetapi menjadi tema diskusi yang berulang dalam pertemuan informal.

Temuan tentang kontestasi ini resonan dengan literatur tentang konflik sumber daya dan dinamika kekuasaan di pedesaan Indonesia. Penelitian tentang konflik manajemen di era demokrasi pasca-otoriter Indonesia menunjukkan bahwa kontestasi atas tanah, akses sumber daya, dan rente telah lama mendasari konflik subnasional dan ketegangan pusat-daerah. Dalam konteks yang lebih mikro di tingkat desa, kontestasi ini termanifestasi dalam persaingan untuk posisi dalam struktur organisasi dan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Studi tentang Dana Desa juga mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan pedesaan, dalam praktiknya, Dana Desa menjadi hadiah bagi kelas penguasa desa yang kekuatannya terletak pada kepemilikan tanah dan produksi komoditas pertanian.

Mekanisme Kolaborasi: Musyawarah, Kompromi, dan Pembagian Peran

Meskipun kontestasi hadir, kolaborasi antara elit desa dan ex anggota kelompok tani juga terjalin melalui berbagai mekanisme. Musyawarah desa menjadi forum utama di mana berbagai kepentingan dinegosiasikan dan kompromi dicapai. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan formal, tetapi juga sebagai ruang di mana elit desa membangun legitimasi dan ex anggota kelompok tani mengekspresikan aspirasi mereka. Prinsip musyawarah mufakat yang dianut dalam forum ini memungkinkan pencapaian kesepakatan meskipun terdapat perbedaan kepentingan. Namun demikian, musyawarah ini juga mengandung bias struktural yang menguntungkan elit desa karena mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengartikulasikan argumen dan memobilisasi dukungan.

Kompromi kepentingan terjadi melalui mekanisme win-win solution di mana elit desa memberikan konsesi tertentu kepada ex anggota kelompok tani sebagai imbalan atas dukungan dan legitimasi. Salah satu bentuk kompromi yang teridentifikasi adalah alokasi posisi-posisi operasional dalam struktur koperasi kepada ex anggota kelompok tani, sementara posisi strategis tetap dipegang oleh elit desa atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Misalnya, posisi manajer unit simpan pinjam diberikan kepada mantan ketua kelompok tani yang memiliki kredibilitas di kalangan petani, sementara posisi ketua dan bendahara koperasi dipegang oleh kepala desa dan sekretaris desa. Pembagian peran ini mencerminkan upaya elit desa untuk mengakomodasi aspirasi ex anggota kelompok tani sambil mempertahankan kontrol terhadap aspek-aspek strategis.

Kolaborasi juga difasilitasi oleh modal sosial yang telah terbangun sebelumnya melalui hubungan kekerabatan, pertetanggaan, dan partisipasi bersama dalam berbagai aktivitas komunal. Penelitian tentang modal sosial dalam kinerja ekonomi perusahaan pedesaan menunjukkan bahwa modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma merupakan prasyarat untuk tata kelola yang baik dan efektif. Di Koperasi Desa Merah Putih, modal sosial ini termanifestasi dalam gotong royong untuk kegiatan koperasi, saling membantu dalam musim panen, dan dukungan moral dalam menghadapi kesulitan. Ikatan sosial ini membantu melembutkan ketegangan yang muncul dari kontestasi kepentingan dan memfasilitasi kompromi.

Namun demikian, kolaborasi yang terjalin juga memiliki keterbatasan. Kolaborasi ini lebih bersifat instrumental dan situasional daripada berbasis pada kesetaraan struktural. Ex anggota kelompok tani berkolaborasi dengan elit desa karena mereka memerlukan akses ke sumber daya yang dikontrol oleh elit, bukan karena mereka memiliki posisi tawar yang kuat. Bentuk kolaborasi ini konsisten dengan konsep yang diajukan oleh penelitian tentang kepemimpinan desa adat dalam konservasi kelautan, yang menunjukkan bahwa kerja sama dengan kelompok atau individu elit lokal yang dominan dapat menyediakan titik masuk yang berharga untuk melibatkan komunitas dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan, meskipun dengan risiko marginalisasi kelompok-kelompok tertentu.

Transformasi Kelembagaan dan Perubahan Dinamika Kekuasaan

Transformasi dari kelompok tani menjadi koperasi desa membawa perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan pola partisipasi anggota. Sebelum transformasi, kelompok tani beroperasi dengan struktur yang relatif flat dengan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kompetensi teknis dan kepercayaan sesama petani. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dengan setiap anggota memiliki suara yang relatif setara. Sumber daya kelompok tani berasal dari kontribusi anggota dan bantuan pemerintah yang relatif terbatas, menciptakan ketergantungan yang minimal terhadap aktor eksternal. Namun, dengan menjadi koperasi desa, struktur organisasi menjadi lebih hierarkis dengan pemisahan yang jelas antara pengurus, pengawas, dan anggota. Formalisasi ini membawa implikasi pada distribusi kekuasaan yang menjadi lebih terpusat.

Akses ke Dana Desa dan sumber pendanaan lain yang lebih besar melalui status koperasi desa juga mengubah basis kekuasaan. Dalam kelompok tani, kekuasaan lebih berbasis pada pengetahuan teknis tentang pertanian dan kemampuan untuk memobilisasi kerja kolektif. Dalam koperasi desa, kekuasaan lebih berbasis pada kontrol terhadap modal finansial dan akses ke jaringan birokrasi. Pergeseran ini menguntungkan elit desa yang memiliki posisi dalam struktur pemerintahan dan koneksi dengan birokrasi kabupaten. Temuan ini konsisten dengan penelitian tentang BUMDes yang menunjukkan bahwa motivasi administrator BUMDes seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti loyalitas politik, status sosial, dan ekspektasi akses ke sumber daya desa yang dikontrol oleh elit lokal.

Partisipasi anggota juga mengalami perubahan pascatransformasi. Dalam kelompok tani, partisipasi cenderung lebih aktif dan langsung dengan anggota terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dalam koperasi, partisipasi

anggota lebih terbatas pada forum-forum formal seperti Rapat Anggota Tahunan dan penggunaan layanan koperasi. Banyak ex anggota kelompok tani mengungkapkan rasa kehilangan ikatan komunal yang kuat yang mereka miliki dalam kelompok tani. Mereka merasa bahwa koperasi menjadi lebih birokratis dan kurang responsif terhadap kebutuhan mereka. Namun demikian, beberapa informan juga mengakui bahwa formalisasi melalui koperasi membawa manfaat berupa akses ke layanan yang lebih profesional dan sumber daya yang lebih besar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi

Analisis terhadap data mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam konteks struktur kekuasaan yang timpang. Pertama, kepemimpinan yang inklusif menjadi faktor kunci. Dalam kasus di mana elit desa menunjukkan sensitivitas terhadap aspirasi ex anggota kelompok tani dan berupaya mengakomodasi kepentingan mereka, kolaborasi berjalan lebih baik. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter dan tidak responsif menciptakan resistensi dan menghambat kolaborasi. Kedua, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan meningkatkan kepercayaan dan kesediaan untuk berkolaborasi. Koperasi yang secara rutin melaporkan keuangan dan membuka ruang untuk pertanyaan dari anggota mengalami tingkat kolaborasi yang lebih tinggi.

Ketiga, kehadiran fasilitator eksternal seperti pendamping desa dan LSM dapat memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan kepentingan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Fasilitator yang terlatih dapat membantu ex anggota kelompok tani untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dengan lebih efektif dan mendorong elit desa untuk lebih inklusif. Penelitian tentang mitigasi ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan kolaboratif di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pelatihan fasilitasi umum, melatih warga desa sebagai fasilitator, mempromosikan pembagian pengetahuan yang setara, dan memungkinkan warga desa membuat keputusan sendiri dapat mengurangi ketimpangan kekuasaan. Keempat, kerangka regulasi yang mempromosikan partisipasi dan akuntabilitas juga berpengaruh. Implementasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip koperasi dan pengawasan dari pemerintah kabupaten dapat mendorong praktik yang lebih demokratis.

Kelima, kapasitas organisasi dan sumber daya ex anggota kelompok tani mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat secara efektif dalam kolaborasi. Petani dengan pendidikan yang lebih tinggi, akses ke informasi, dan pengalaman organisasi cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Program peningkatan kapasitas yang menargetkan petani kecil dapat membantu mengurangi gap ini. Keenam, modal sosial yang telah terbangun melalui interaksi jangka panjang dalam komunitas memfasilitasi kolaborasi dengan menyediakan basis kepercayaan dan norma timbal balik. Namun, modal sosial ini juga dapat memperkuat pola patronase jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas struktural kelompok subordinat untuk melakukan advokasi kepentingan mereka.

Matriks.1.1. Hasil Penelitian

Aspek	Temuan	Implikasi	Rekomendasi
Pola Komunikasi	Patronase, hierarkis, dan asimetris dengan dominasi elit desa dalam aliran informasi	Terbatasnya partisipasi substantif ex anggota kelompok tani dalam pengambilan keputusan strategis	Penguatan kapasitas komunikasi anggota dan diversifikasi channel komunikasi
Kontestasi	Terjadi pada akses sumber daya, distribusi manfaat, dan legitimasi kepemimpinan	Ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan potensi konflik laten	Mekanisme alokasi sumber daya yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan
Kolaborasi	Terjalin melalui musyawarah, kompromi kepentingan, dan pembagian peran operasional	Kolaborasi instrumental yang belum berbasis kesetaraan struktural	Penguatan posisi tawar ex anggota kelompok tani melalui pembangunan kapasitas kolektif
Transformasi Kelembagaan	Perubahan dari struktur flat ke hierarkis dengan sentralisasi kekuasaan	Berkurangnya partisipasi aktif dan ikatan komunal anggota	Desain transformasi yang partisipatif dengan mempertahankan nilai komunal

Sintesis Temuan dengan Teori dan Riset Terdahulu

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teoritis tentang dinamika kekuasaan dalam tata kelola koperasi desa di Indonesia. Pola komunikasi patronase yang teridentifikasi dalam penelitian ini konsisten dengan teori patron-klien yang telah lama menjadi kerangka analisis untuk memahami relasi sosial-politik di pedesaan Indonesia. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola patronase kontemporer lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan model tradisional. Elit desa tidak sepenuhnya otonom dalam menjalankan kekuasaan mereka, melainkan harus terus bernegosiasi dengan ex anggota kelompok tani dan merespons tuntutan akuntabilitas yang muncul dari kerangka regulasi baru. Kompleksitas ini mencerminkan perubahan dalam struktur oportunitas politik di era desentralisasi yang membuka ruang bagi agensi kelompok subordinat.

Dalam perspektif teori modal sosial, penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya kepercayaan, jaringan, dan norma dalam memfasilitasi kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya bersama. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa modal sosial tidak netral terhadap struktur kekuasaan. Modal sosial dapat digunakan oleh elit untuk memperkuat dominasi mereka melalui manipulasi norma timbal balik dan penguatan jaringan patronase. Oleh karena itu, promosi modal sosial dalam pembangunan pedesaan harus disertai dengan upaya untuk

mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil. Pendekatan yang hanya fokus pada penguatan modal sosial tanpa memperhatikan ketimpangan struktural dapat justru memperkuat status quo.

Temuan tentang kontestasi dan kolaborasi yang terjadi secara simultan menantang dikotomi sederhana antara elite capture dan participatory governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa elit desa memang memiliki kekuasaan yang signifikan dan cenderung menggunakan posisi mereka untuk mengamankan kepentingan mereka. Namun, mereka juga harus membuat konsesi dan mengakomodasi kepentingan ex anggota kelompok tani untuk mempertahankan legitimasi dan memastikan keberlanjutan koperasi. Ex anggota kelompok tani, meskipun memiliki posisi yang lebih lemah, tidak sepenuhnya pasif melainkan menggunakan berbagai untuk mempengaruhi keputusan dan mengamankan akses ke sumber daya. Pandangan yang lebih nuansa ini sejalan dengan literatur terkini tentang elite capture yang mengakui bahwa elit lokal dapat mempekerjakan strategi untuk memaksimalkan manfaat kolektif, bukan hanya kepentingan pribadi.

Dalam konteks transformasi kelembagaan, temuan penelitian ini menambah pada literatur tentang dampak formalisasi organisasi komunitas. Sementara formalisasi membawa manfaat berupa akses ke sumber daya yang lebih besar dan layanan yang lebih profesional, ia juga mengubah dinamika internal organisasi dengan cara yang dapat merugikan anggota yang lebih lemah. Perubahan dari struktur flat ke hierarkis, dari pengambilan keputusan kolektif ke yang lebih terpusat, dan dari basis kekuasaan yang berakar pada kompetensi teknis ke yang berakar pada posisi formal dan modal finansial, semuanya berkontribusi pada marginalisasi ex anggota kelompok tani. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mendesain proses transformasi kelembagaan yang memperhatikan risiko sentralisasi kekuasaan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempertahankan elemen-elemen demokratis dari organisasi awal. Penelitian ini juga berkontribusi pada debat tentang implementasi Dana Desa dan implikasinya terhadap dinamika kekuasaan di tingkat desa. Temuan mengkonfirmasi kekhawatiran yang diungkapkan dalam literatur tentang apropriasi Dana Desa oleh kelas penguasa desa. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa apropriasi ini tidak absolut dan terdapat ruang untuk resistensi dan negosiasi. Keberadaan kerangka regulasi yang mempromosikan transparansi dan partisipasi, meskipun implementasinya belum optimal, memberikan basis bagi ex anggota kelompok tani untuk menuntut akuntabilitas. Peran fasilitator eksternal juga penting dalam membantu masyarakat untuk menggunakan ruang-ruang partisipasi yang disediakan oleh kerangka legal.

Dari perspektif teori demokratisasi pedesaan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa demokratisasi adalah proses yang kontestasional dan tidak linier. Implementasi kerangka legal yang demokratis tidak otomatis menghasilkan praktik yang demokratis di tingkat lokal. Struktur kekuasaan yang telah mapan, kultur politik yang hierarkis, dan ketimpangan ekonomi semuanya bekerja untuk membatasi praktik demokratis. Namun demikian, kerangka legal yang baru juga membuka peluang bagi aktor-aktor yang sebelumnya termarginalkan untuk menantang dominasi elit. Demokratisasi pedesaan, oleh karena itu, harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang memerlukan tidak hanya perubahan institusional tetapi juga transformasi kultur politik dan redistribusi sumber daya ekonomi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dan interaksi antara elit desa dan ex anggota kelompok tani dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih masih didominasi oleh elit desa, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi tersebut memunculkan kontestasi terkait akses sumber daya, distribusi manfaat ekonomi, dan legitimasi kepemimpinan. Meskipun demikian, kolaborasi tetap terjalin melalui mekanisme musyawarah, kompromi kepentingan, dan pemanfaatan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat desa.

Transformasi kelembagaan dari kelompok tani menjadi koperasi desa memberikan manfaat berupa meningkatnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Namun, perubahan tersebut juga menciptakan struktur organisasi yang lebih formal dan hierarkis sehingga partisipasi ex anggota kelompok tani dalam pengambilan keputusan menjadi relatif terbatas. Keterlibatan mereka dalam koperasi lebih banyak didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh akses dan manfaat yang disediakan oleh koperasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun komunikasi yang inklusif, partisipatif, dan transparan. Oleh karena itu, pengurus koperasi dan pemerintah desa perlu memperluas keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, serta meningkatkan kapasitas anggota melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif atau longitudinal guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi, relasi kekuasaan, dan keberlanjutan koperasi desa dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalinda Savirani, O. T. 2015. *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. PolGov UGM Press.
- Antlöv, H. 2003. Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2). <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Arai, Y., Maswadi, Oktoriana, S., Suharyani, A., Didik, & Inoue, M. 2021. How can we mitigate power imbalances in collaborative environmental governance? Examining the role of the village facilitation team approach observed in west Kalimantan, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/su13073972>
- Aritenang, A. 2021. The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>
- Aspinall, E., & Rohman, N. 2017. Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. In *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol. 48, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Berenschot, W., Nordholt, H. S., & Bakker, L. 2017. Citizenship and Democratization in Southeast Asia. In *Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia* (Vol. 115). <https://doi.org/10.1163/9789004329669>
- Diprose, R., & Azca, M. N. 2020. Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict, Security and Development*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705074>
- Hadi, S., Aprisco, H., Abdillah, M. F., & Suroso, B. 2025. The exemplary role of farmer institutional administrators as a strengthener for the holistic and integrative reform of the agricultural development paradigm. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 3(1), 21–43. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v3i1.2025.1973>
- Hakim, L., Kolopaking, L. M., Sjaf, S., & Kinseng, R. A. 2025. Assessing village democracy and welfare in rural Indonesia: an index-based correlation analysis. *Frontiers in Political Science*, 7(September), 1–19. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507>
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. 2025. Shifting collective values: the role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Ibnu, M., Offermans, A., & Glasbergen, P. 2018. Certification and farmer organisation: Indonesian smallholder perceptions of benefits. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1506093>
- Ikram, A. A. D. W., Salam, M., AT, M. R., & Muhammad, S. 2025. Employing Structural Equation Modeling to Examine the Determinants of Work Motivation and Performance Management in BUMDES: In Search of Key Driver Factors in Promoting Sustainable Rural Development Strategies. *Sustainability (Switzerland)*, 17(15), 1–44. <https://doi.org/10.3390/su17156855>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

- https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Mietzner, M. 2024. Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), 223–234. <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Nurlinah, & Haryanto. 2024. Transmigration village development: the state and community organizations in rural Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6(October), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1441393>
- O'Toole, L. J. 1998. *Institutions, Policy and Outputs for Acidification The Case of Hungary*.
- Sidik, F., & Habibi, M. 2024. A Prize for the Village Ruling Class: “Village Funds” and Class Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 54(3). <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968>
- Slikkerveer, L. 2019. *Gotong Royong: An Indigenous Institution of Communalism and Mutual Assistance in Indonesia*. Nova Science Publishers.
- Steenbergen, D. J. 2016. Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. *Human Ecology*, 44(3). <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9829-6>
- Tarlani, & Sirajuddin, T. 2020. Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012066>
- Tio, M. R. S., & Nugroho, H. S. 2022. Implementation of Village Fund Management Policy on Community Empowerment in Cokrodiningratan Village, Yogyakarta City. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2289>
- Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. 2017. Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2). <https://doi.org/10.1017/als.2017.21>
- Wu, P., & Feng, H. 2022. Elite Participation's Path on Rural Governance: A Case Study in China. *BCP Business & Management*, 18, 199–205. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v18i.554>